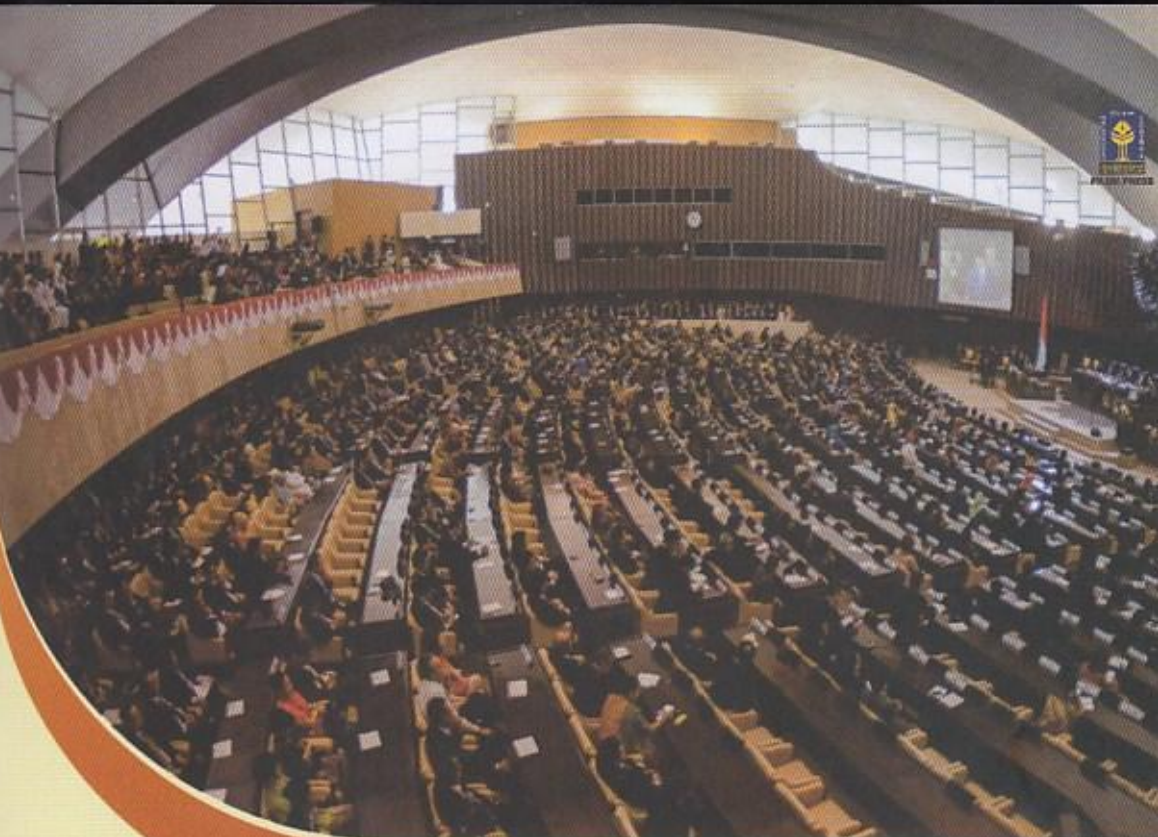




Dr. Ni'matul Huda, SH., MHum. (Editor)



PROBLEMATIKA KETETAPAN MPR

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

Bagian I

1. Kedaulatan Rakyat, MPR dan Ketetapan MPR Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH.	1
2. Politik Hukum Masuknya Ketetapan Majelis Permasyawaratan Rakyat dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Dr. Muntoha, SH., MAg.	25
3. Kedudukan dan Implikasi Yuridis Ketetapan MPR Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dr. Ni'matul Huda, SH., MHum.	51
4. Eksistensi dan Problematika Ketetapan Majelis Permasyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dr. Ridwan, SH., MHum.	85
5. Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan Majelis Permasyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia Dr. Saifudin, SH., MHum dan Dessy A., SH., MH.	97

6. Urgensi Penegasan Pemilahan Materi Muatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Undang-Undang
Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D. 131

Bagian II

1. *Positioning* Kelembagaan MPR Sebagai Pemegang Mandat Rakyat
Erlina, SH., MH. 141
2. Reformasi Ulang Kedudukan MPR dan Gagasan Pengujian Tap MPR
Despan Heryansyah, SH. 155
3. Purifikasi Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945
King Faisal Sulaiman, SH., LL.M. 195
4. Kajian Kritis Kedudukan Ketetapan MPR dan Gagasan Arah Materi Muatannya di Masa Mendatang
Ali Rido, SH. 215
5. Meninjau Ulang Kedudukan Tap MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Herry Setya Nugraha, SH. 245